

PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA KERTI DANA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA ABANGSONGAN, KINTAMANI

I Made Jamin Yasa¹⁾, Anak Agung Bagus Amlayasa²⁾, Dewi Soraya³⁾

^{1,2,3}Universitas Warmadewa Denpasar

amlayasaaabgs@gmail.com

Abstract

This community service activity was carried out at BUMDes Kerti Dana in Abangsongan Kintamani Village. Based on the results of initial observations with the Abangsongan village government apparatus, the biggest problem faced is the lack of synergy between the village government, village communities, business actors, and BUMDes in order to develop the village's economic potential. The poor cooperation between the village government, village communities, business actors and BUMDes can be seen from the lack of training and development programs for the community in terms of business management. The solutions given to these problems are (1) Providing counseling related to a more detailed and comprehensive description of the importance of strengthening BUMDes management in order to optimize BUMDes functions for the development of the potential of the village of Abangsongan. (2) Provide education regarding good Bumdes governance. (3) Providing training on basic budget preparation, SOP preparation, business innovation training that will be developed by Bumdes. BUMDes have an important role for the economy of the village government to improve the welfare of its citizens. The results of this PKM activity have a positive impact on increasing the understanding of BUMDes managers. Socialization, training and mentoring activities can increase the understanding and skills of BUMDes managers in the Abangsongan Kintamani village to fulfill administrative obligations, develop SOPs as activity guidelines.

Keywords: Business Management; Governance; BUMDes; Kintamani

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi desa merupakan salah satu upaya untuk menghadapi perkembangan ekonomi pedesaan yang relatif lambat dengan cara memanfaatkan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara optimal (Suwito & Yusuf 2020). Pemanfaatan potensi ekonomi desa yang optimal dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Vibriyanti, 2020). Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Amanat yang terletak pada pengertian BUMDes adalah kehebatan BUMDes tidak terletak pada kemampuannya mencetak laba besar, tetapi kehebatan BUMDes terletak pada kemampuannya dalam memberikan manfaat sosial (*sosial benefit*) bagi kehidupan warga desa. Yunita *et.al.*, (2019) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDES diperlukan untuk memobilisasi potensi desa dan dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh Sudibyo & Rusliati, (2021)

bahwa pendirian BUMDes merupakan salah satu cara untuk menciptakan ekonomi pedesaan yang mandiri untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. BUMDes diharapkan dapat mewujudkan pemerintah desa yang mandiri, apalagi dengan adanya krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 yang membuat roda perputaran keuangan masyarakat mengalami kemacetan (Aniyah, 2020).

Pengembangan BUMDes harus dilakukan agar BUMDes yang ada dapat berfungsi sesuai dengan perannya. Ketika BUMDes dikelola secara fokus dan profesional, tujuan BUMDes tercapai. BUMDes merupakan solusi dari permasalahan yang muncul di desa. BUMDes diharapkan dapat memajukan dan menggerakkan perekonomian desa (Hariyanto & Wahyuni, 2020). Dampak modal intelektual juga diperlukan dalam pengembangan atau peningkatan suatu organisasi (Sari, 2021). Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah mengelola potensi kreatif dan inovatif desa serta membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja pertanian. BUMDes diharapkan dapat berperan strategis dalam mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan dan meningkatkan pendapatan asli desa atau PAD (Amin & Astuti, 2021).

Hambatan pengembangan BUMDES adalah masalah komunikasi antara BUMDES, pemerintah desa dan masyarakat desa, transparansi dan akuntabilitas, dan sumber daya manusia yang terbatas (Bambang, 2017; Yulinartati, Y & Martini N,N.P., 2021) serta Kemampuan perencanaan bisnis yang buruk (Nur, 2021). BUMDes diharapkan mampu berperan banyak dalam pembangunan desa melalui pengelolaan potensi desa secara optimal, memenuhi kebutuhan masyarakat desa tanpa mematikan usaha yang sudah ada di desa yang telah berdiri sebelumnya. Peran BUMDes dalam pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara mengelola dana yang tersedia dalam bentuk simpan pinjam, pendirian toko yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat desa dan penyewaan peralatan kerja masyarakat desa. Kehadiran BUMDes di desa diharapkan mampu menopang pembangunan ekonomi desa.

Desa Abangsongan merupakan salah satu dari 48 desa di wilayah Kecamatan Kintamani. Desa Abangsongan memiliki luas wilayah 1.433 hektar. Desa abangsongan terdiri dari 6 banjar (Br Abangsongan, Br Bias kaja, Br Bias kelod, Br Belong danginan, Br Belo 54% ng dauhan, Br Abang) dengan jumlah penduduk 1.416 jiwa dimana 30,01% masyarakatnya mengenyam pendidikan sampai SD/ sederajat serta 21,54% masyarakat desa abangsongan tidak memiliki pekerjaan. BUMDES Kerti Dana mulai ada di Desa Abangsongan sejak tahun 2010 dengan alokasi bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi BALI dalam rangka program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Bali Aman, Damai Sejahtera (GERBANG SADU BALI MANDARA), namun kurangnya koordinasi dan pengawasan serta pembinaan secara aktif dan berkelanjutan, sehingga Badan Usaha Milik Desa tersebut sampai saat ini mengalami “**Mati Suri**” dan tidak jelas keberadaannya baik kepengurusan maupun pendanaannya. Hal tersebut dikarenakan stigma yang berkembang di masyarakat

bahwa dana yang ada merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi (<https://www.abangsongan.desa.id/>).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, bahwa berdasarkan hasil data sensus penduduk berdasarkan status pekerjaan masyarakat Desa Abangsongan periode Tahun 2022 dapat dikatakan bahwa hampir sebagian masyarakat bekerja sebagai petani/pekebun sebesar 36,72%, 21,54% belum/tidak bekerja, 16,67 % berstatus pelajar.mahasiswa, sisanya terdapat profesi PNS, POLRI, Pensiunan dan lain-lain. Selanjutnya hasil PAD masyarakat juga masih rendah dibawah 1%. Salah satunya adalah kontribusi dari pendapatan BUMDES sebesar 0,6% dari RAPBDes Tahun 2022, sehingga indeks kemandirian desa juga masih rendah. Pengelolaan BUMDES Kerti Dana selama ini hanya terfokus pada usaha simpan pinjam. Sebagian besar penduduk Desa sebagai petani yakni menanam sayur di sekitar Danau Batur, sebagian juga ada sebagai pengerajin. Padahal, desa ini memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, kemungkinan ini tidak dapat dimanfaatkan. Sebenarnya mereka berharap banyak dari BUMDes yang telah dibentuk, namun ada beberapa keterbatasan yang menghambatnya untuk bekerja secara maksimal.

Permasalahan pokok BUMDes di Desa Abangsongan sebagai mitra PKM adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti penting BUMDes untuk pengembangan ekonomi di desa dan masih rendahnya kualitas SDM pengelolaan BUMDes karena beberapa hal berikut: (1) pengurus organisasi masih belum mampu dalam melakukan tata Kelola organisasi dengan baik sesuai dengan prinsip manajemen dan kepemimpinan organisasi sehingga BUMDes masih belum bekerja dengan efektif. Inefisiensi dalam pengelolaan organisasi membuat peran BUMDestidak responsif terhadap kreativitas dan rancangan program kerja dan bisnis. (2) Lemahnya BUMDes sebagai badan usaha milik pemerintah desa karena minimnya aktivitas pengelola BUMDes yang bekerja secara dangkal karena tidak memahami pentingnya BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Melalui kegiatan pengabdian ini, selanjutnya dilakukan tranformasi dalam bentuk memberikan pelatihan dan pengetahuan untuk mengembangkan dan membentuk sumberdaya manusia (SDM) yang mampu mengelola BUMDes, sehingga hasil akhir dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah memprioritaskan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan sumberdaya di desa Abangsongan dengan target yang ingin dicapai yaitu BUMDes Kerti Dana mengalami peningkatan dan berkelanjutan serta menjadi desa yang mandiri.

METODE PEMECAHAN MASALAH

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan BUMDes adalah melalui penyelenggaraan *WORKSHOP* dengan kelompok sasaran pengelola BUMDes, para pendamping desa dan masyarakat secara umum. Penggunaan metode ini dapat dijelaskan bahwa BUMDes Kerti Dana selama ini mengalami Mati Suri dalam kegiatan operasionalnya, sehingga diperlukan suntikan berupa Motivasi dan dorongan serangkaian mengatasi berbagai aspek permasalahan yang dihadapinya. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari FEB Universitas Warmadewa akan melakukan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM), seperti yang dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat

Selanjutnya dilakukan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mitra terhadap pelatihan-pelatihan yang dilakukan.

Kegiatan program kemitraan masyarakat ini membutuhkan peran serta aktif dari pihak mitra. Adapun Partisipasi mitra yang dalam hal ini adalah Bumdes kerti dana adalah (1) menyediakan lokasi atau tempat diselenggarakannya diseminasi atau sosialisasi, (2) menyediakan instalasi listrik saat sosialisasi di dalam mengoperasikan alat bantu seperti LCD, Laptop dan sebagainya (3) Berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan dan praktek selama kegiatan pengabdian berlangsung.

Untuk melaksanakan ketiga metode yang telah diuraikan maka tim program kemitraan masyarakat membagi tugas-tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

di dalam tim, seperti misalnya 1) Bapak Drs. I Made Jamin Yasa, M.M. berkompetensi dalam bidang ilmu manajemen selaku ketua tim pelaksana bertugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan program serta memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pendampingan terhadap arti pentingnya manajemen organisasi bisnis, 2) Anak Agung Bagus Amlayasa, S.E., M.Si. berkompetensi dalam bidang ilmu akuntansi keuangan selaku anggota tim pelaksana bertugas memberikan penyuluhan terkait dengan sistem informasi keuangan serta pelatihan dan praktek langsung dalam menyusun laporan keuangan bumdes. 3) Ibu Dewi Soraya, S.E., M.M. yang berkompetensi dalam ilmu manajemen pemasaran, selaku anggota tim pelaksana bertugas memberikan pelatihan dalam penyusunan perencanaan manajemen pemasaran dan inovasi usaha. Selain menggunakan tenaga ahli, kegiatan pengabdian ini menggunakan 2 mahasiswa sebagai tenaga pembantu pelaksanaan kegiatan yakni: Ni Wayan Vani Endayanti dan Ni Putu Neny Cahyani.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada BUMDes Kerti Dana Desa Abangsongan Kintamani dan disambut baik oleh Kades, Sekdes, Ketua Bumdes dan staf bumdes lainnya. Bumdes kerti dana merupakan salah satu bumdes yang terbilang masih kurang dalam pengelolaannya. Lemahnya tingkat pengetahuan pengurus bumdes ini menjadikan kami sebagai tim pengabdian melakukan beberapa tindak perbaikan melalui penyuluhan mengenai optimalisasi bumdes melalui penguatan manajemen, tata kelola serta SOP yang baik.

Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kert Dana dijabarkan melalui fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, directing, controlling*. Perencanaan BUMDes yang kurang matang dan belum memikirkan rencana jangka panjang. Pada pengorganisasian, pembagian kerja belum sesuai keahlian dan masih kurangnya penekanan pada job description. Pada fungsi pengarahan belum dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua karyawan. Pada fungsi pengawasan, dengan baik termasuk pengawasan akan keberlanjutan Bumdes. Bapak Drs. I Made Jamin Yasa, MM selaku ketua tim pengabdian kepada masyarakat memberikan sosialisasi terkait pentingnya suatu lembaga memiliki manajemen BUMDes yang baik. Manajemen BUMDes dijabarkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu : *Planning, Organizing, Directing, dan Controlling*. Pada BUMDes Kerti Dana keempat konsep fungsi manajemen ini belum optimal dilaksanakan. Lebih lanjut Bapak Jamin Yasa menjelaskan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang hendak di capai oleh BUMDes Kerti Dana (Tahap *Planning*), selanjutnya membentuk tim organisasi yang tepat untuk melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. (Tahap *Organizing*), selanjutnya pada tahap *directing*, dimana dalam tahapan ini memiliki tujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Selain itu, fungsi ini juga memastikan adanya koordinasi dan kooperasi dari setiap bagian agar terciptanya harmonisasi dalam

lingkungan kerja. Tahap *controlling* merupakan tahapan terakhir yang harus dilakukan, dimana pada tahapan *controlling* ini pimpinan mampu melakukan tindakan koreksi kepada pegawai jika melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, selain itu pimpinan juga harus mampu memastikan bahwa seluruh pekerjaan bias selesai tepat waktu dan tidak melebihi *budget* yang telah dilakukan. Penerapan fungsi manajemen yang baik dalam BUMDes Kerti Dana akan memberikan dampak terhadap tercapainya tujuan organisasi secara efisien.



Gambar 1 Penyampaian literasi manajemen usaha

Sosialisasi selanjutnya diberikan oleh Bapak A.A. Bagus Amlayasa, S.E., M.Si dimana BUMDes memiliki peran yang penting bagi perekonomian pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi desa. Dengan demikian akan mendorong lahirnya desa desa mandiri dengan pengelolaan yang lebih akuntabel dan transparan. Peran masyarakat desa yang partisipatif dan semangat gotong royong juga berhasil mendukung BUMDes dalam meningkatkan ekonomi pemerintahan desa. Sebagai entitas bisnis yang dimiliki oleh public, tata kelola BUMDes juga tunduk pada beberapa prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan tata pemerintahan yang baik (*good government governance*). Prinsip-prinsip tata kelola BUMDes, antara lain:

1. Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik
2. Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes
3. Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan

agama

4. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut
5. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggung jawabkan
6. Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.



Gambar 2 Penyampaian materi tata kelola

Melalui BUMDes upaya pemerintah desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan memajukan ekonomi desa dapat dikelola dengan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan masyarakat dan potensi desa dapat dipertemukan dalam unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BUMDes. Orientasi BUMDes tidak selalu pada keuntungan, namun dengan adanya BUMDes diharapkan dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai sosial lokal dan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang kurang beruntung.

Kemudian tim pengabdian memberikan memberikan pelatihan-pelatihan atau *capacity building* bagi pengurus diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan professional. pelatihan yang diberikan antara lain Manajemen keuangan, tata kelola pembukuan, kombinasi teknologi dan sejenisnya, Dalam peningkatan kapasitas selain pelatihan dan pendampingan juga diberikan kesempatan untuk magang di lembaga lembaga usaha yang sudah ada baik BUMN atau swasta yang sesuai dengan bidang BUMDes, selain itu juga dilakukan studi banding dengan Badan Usaha Milik Desa yang sudah berdiri dan beroperasi dengan baik atau BUMDes - BUMDes unggulan di daerah lain.

Dilanjutkan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dengan pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) BUMDes yang berisi aturan-aturan proses kerja dengan langkah langkah yang harus distandarkan dan menjadi acuan yang harus dilaksanakan untuk menuju tujuan BUMDes Kerti Dana. Hal hal substansif yang menjadi fokus untuk penguatan dan pengembangan dimulai dengan penggalian potensi yang ada di desa, bagaimana agar BUMDes Kerti Dana mengetahui kira kira peluang usaha apa yang menjadi unggulan dari desa atau juga bisa misalkan potensi masyarakat desa Abangsongan yang mendominasi adalah mayoritas penduduknya sebagai petani sayur dan pertukangan, hal tersebut bisa ditangkap menjadi sebuah peluang untuk dikembangkan, dan menjadi tugas BUMDes untuk mewadahi dan memfasilitasi potensi tersebut jika BUMDes berbentuk koperasi bisa memberikan simpan pinjam lunak kepada para petani sayur atau langsung membentuk BUMDes produksi, hal hal tersebut adalah upaya untuk BUMDes Kerti Dana dalam menggali potensi yang ada di desa yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan Desa Abangsongan, Kintamani. Untuk mewujudkan BUMDes yang sukses, maka dibutuhkan strategi perencanaan dan pijakan yang kuat. Terutama bagi desa yang baru membangun BUMDes.

Hasil kegiatan PKM ini memberikan pemahaman secara teoritis kepada pengurus BUMDes Kerti Dana agar mereka mampu membangun dan mengembangkan kembali BUMDes Kerti Dana kearah yang lebih baik. Secara keseluruhan, pengurus BUMDes sangat merespon sosialisasi yang tim pengabdian berikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diakhiri dengan penyerahan SOP dan foto bersama.



Gambar 3 Penyerahan SOP



Gambar 4 Foto Bersama

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dijalankan dengan efektif dalam rangka mengoptimalkan kembali BUMDes Kerti Dana dalam mewujudkan desa mandiri, yang diharapkan untuk kedepannya BUMDes mampu mandiri, membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Segala bentuk kegiatan yang telah diberikan kepada pengurus BUMDes meliputi:

1. Sosialisasi pentingnya manajemen usaha dalam membangkitkan fungsi manajemen dalam suatu organisasi dimana dengan diterapkannya manajemen usaha ini akan mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan BUMDes,
2. Sosialisasi tata kelola BUMDes yang baik dalam mewujudkan kinerja BUMDes sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
3. Pelatihan menyusun SOP sebagai pedoman kegiatan, melakukan inovasi kegiatan usaha, serta menyusun rancangan *business plan* (perencanaan usaha) yang baik, serta pelatihan penyusunan laporan keuangan BUMDes

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terprogram dan berkelanjutan secara signifikan dapat meningkatkan kesadaran dan kontinuitas dalam penguatan manajemen dan optimalisasi fungsi BUMDes Kerti Dana dalam mengembangkan potensi ekonomi desa Abangsongan Kintamani.

Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di BUMDes Kerti Dana memerlukan pendampingan yang lebih intensif dengan alokasi waktu yang lebih panjang. Hal ini disebabkan karena BUMDes Kerti Dana adalah salah satu BUMDes yang mati suri karena kurangnya pemahaman serta pengetahuan yang dimiliki pengurusnya dalam

mengoptimalkan fungsi BUMDes dan terbentuknya sinergitas antara perangkat desa, pengurus BUMDes dan masyarakat sekitarnya agar BUMDes Kerti Dana mampu bangkit, tumbuh dan berkembang kearah yang lebih baik.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa karena telah memfasilitasi kegiatan PKM ini serta semua belah pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Nur, Rubiyanto, dan Diah. (2020). Pelatihan dan Pendampingan Pengelola Bumdes dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa di Desa Pungging Mojokerto. *Abdimas Nusantara* Vol.2 No.1, Juli 2020.
- Fitriana, R. L., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2018). Pengelolaan dana: Sisi akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa. *Prosiding Konferensi Regional Akuntansi V* (pp. 1–29)
- Juliman, & Muslimin, A. (2019). Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 471–483.
- Pramita, Y. D. (2018). The analysis of understanding Permendes No. 4 year 2015 and use of information systems on Bumdes management accountability. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(4), 1–8
- Sari, P. S. P., & Pramuki, N. M. W. A. (2021). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(4), 109-132.
- Suwito, R., & Yusuf, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 4(1), 88- 101. doi: <https://doi.org/10.15294/pls.v4i1.31319>
- Syam, M. A., Suratno, S., & Djaddang, S. (2021). Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(02), 67-79.
- Vibriyanti, D. (2020). Kesehatan Mental Masyarakat: Mengelola Kecemasan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2902, 69. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.550>
- Website Desa Abangsongan <https://www.abangsongan.desa.id/> diakses 7 Januari 2023
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288.